

Determinasi Faktor Ekonomi dan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Periode 2017-2024

Determination of Economic and Social Factors on Poverty Levels in East Java for the 2017-2024 Period

Serli Noffi Yana^{a*}

Universitas Muhammadiyah Surakarta^a

^ab300220128@student.ums.ac.id*

Abstract

Poverty remains a significant social and economic problem in East Java Province, despite various mitigation programs. Regional inequality and differences in the quality of human resources complicate poverty reduction efforts. This study aims to analyze the influence of economic and social factors on poverty levels in 38 districts/cities in East Java Province during the 2017–2024 period. The variables used include Economic Growth, Gross Regional Domestic Product (GRDP), District Minimum Wage (UMK), Labor Force Participation Rate (TPAK), and Human Development Index (HDI). The analysis was conducted using panel data with a multiple regression approach using Eviews 12.0 software, and the selection of the best model was determined based on the Chow and Hausman tests. The results show that GRDP and HDI variables have a significant effect on poverty levels, while Economic Growth, UMK, and TPAK do not. These findings emphasize the importance of improving the quality of human development and regional economic activity as an effective strategy in reducing poverty levels in East Java.

Keywords: Economic Growth, FEM, GRDP, HDI, Poverty.

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang signifikan di Provinsi Jawa Timur, meskipun berbagai program penanggulangan telah dilakukan. Ketimpangan antarwilayah dan perbedaan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memperumit upaya penurunan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2017–2024. Variabel yang digunakan meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis dilakukan menggunakan data panel dengan pendekatan regresi berganda melalui perangkat lunak Eviews 12.0, serta pemilihan model terbaik ditentukan berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, UMK, dan TPAK tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan aktivitas ekonomi daerah sebagai strategi efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

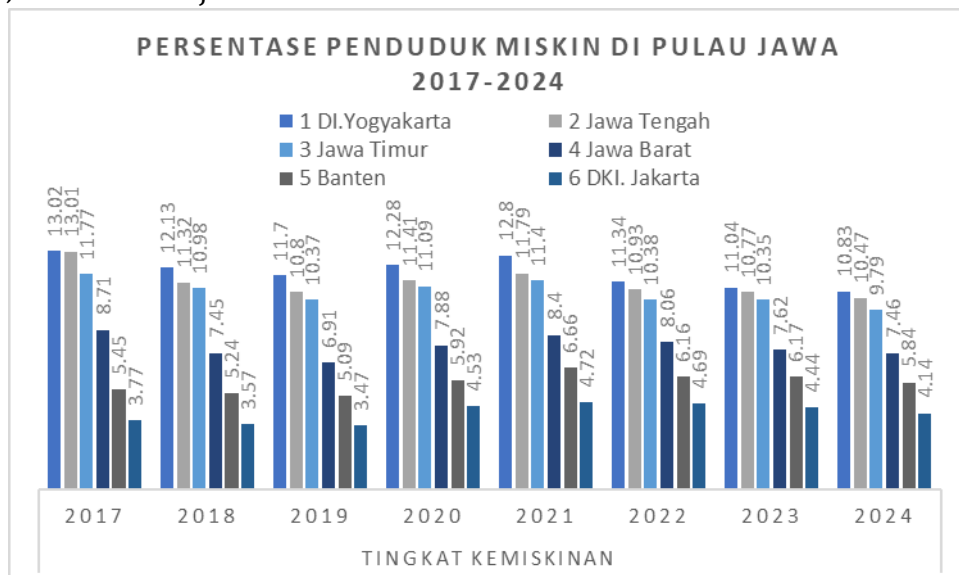
Kata Kunci: FEM, IPM, Kemiskinan, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi.

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi isu sosial dan ekonomi yang krusial di Indonesia serta berperan sebagai hambatan utama dalam proses pembangunan nasional. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan distribusi akses terhadap sumber daya ekonomi (Kusuma et al., 2024). Secara teoritis, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu mencapai standar hidup minimum, baik dari segi pendapatan maupun tingkat konsumsi (Jacobus et al., 2019). Rendahnya pendapatan tersebut menyebabkan

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Hildegunda, 2010). Selain itu, O'Donnell (2024) menegaskan bahwa kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan publik dan partisipasi sosial. Dalam konteks global, kemiskinan absolut diukur berdasarkan penghasilan di bawah USD 1,90 per hari, sedangkan kemiskinan relatif menggambarkan ketimpangan pendapatan dibandingkan rata-rata kesejahteraan masyarakat sekitar (Goerres & Vanhuysse, 2020).

Secara nasional, isu kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2024 mencapai 24,26 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk. Meskipun angka tersebut turun sebesar 1,16 juta jiwa dibandingkan Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional masih tergolong tinggi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.



Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2017-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat secara regional, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,893 juta jiwa atau 9,56 persen dari total penduduk. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,089 juta jiwa dibandingkan Maret 2024, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Timur masih hidup di bawah garis kemiskinan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur belum optimal, meskipun berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi telah dilaksanakan (Nugroho et al., 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh pemerataan hasil pembangunan, akses terhadap sumber daya, serta efektivitas kebijakan pemerintah (Rachmadani et al., 2023). Nafisah dan Anas (2022) menemukan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja, khususnya perempuan, serta kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Asmoro et al. (2022) menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung menekan tingkat kemiskinan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Azhari dan Retno Faridatussalam (2023) yang menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak menunjukkan pengaruh berarti. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara variabel-variabel ekonomi dan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah.

Kesenjangan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemiskinan di tingkat regional. Provinsi Jawa Timur, dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam serta disparitas antarwilayah yang cukup tinggi, menjadi konteks menarik untuk diteliti. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, tanpa mempertimbangkan peran simultan variabel lain seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan UMK dalam model analisis data panel.

Tingginya tingkat kemiskinan memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, menurunnya produktivitas dan daya beli, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah (A'laa & Sutikno, 2018; Fauzi, 2019). Kemiskinan juga berkorelasi erat dengan rendahnya IPM, tingginya pengangguran, dan munculnya berbagai permasalahan sosial lain (Hermawan et al., 2024). Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan menjadi hal yang penting untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih inklusif (Budi Rusdianto et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Analisis dilakukan menggunakan data panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, guna menangkap heterogenitas antarwilayah dan menghasilkan estimasi yang lebih reliabel.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kombinasi variabel makroekonomi dan sosial (UMK, IPM, dan TPAK) secara simultan dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, serta penerapan model data panel untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan ekonomi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor-faktor ekonomi dan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik berbasis data numerik.

Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode observasi selama tahun 2017–2024. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian, serta adanya variasi tingkat kemiskinan antarwilayah yang relevan untuk dianalisis.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat data panel, yaitu gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data lintas wilayah (*cross section*). Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur serta sumber-sumber pendukung lain yang relevan. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung, melainkan memanfaatkan data yang telah tersedia dan terdokumentasi secara resmi.

Model Penelitian

Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

$$TM_{it} = \beta_0 + \beta_1 GROWT_{it} + \beta_2 LOG(PDRB)_{it} + \beta_3 LOG(UMK)_{it} + \beta_4 TPAK_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TM	= Tingkat kemiskinan di Jawa Timur (%)
GROWTH	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDRB	= Produk domestic Regional Bruto (Miliar Rp)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten (Juta Rp)
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien
i	= Wilayah
t	= Waktu
ε_t	= Residual

Prosedur dan Analisis Data

Tahapan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews 12.0 melalui metode regresi data panel. Metode ini digunakan karena mampu menangkap variasi karakteristik antarwilayah dan antarwaktu, sehingga hasil estimasi lebih akurat dan representatif.

Prosedur analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Estimasi tiga model utama, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.
2. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih sesuai dibanding *Common Effect*.
3. Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.
4. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan uji signifikansi parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai pengaruh dan kelayakan model.
5. Tahap akhir adalah interpretasi hasil regresi, guna mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Implementasi Metode

Implementasi metode dilakukan dengan memasukkan seluruh variabel ke dalam model regresi panel di Eviews 12.0. Nilai signifikansi masing-masing koefisien dianalisis untuk menentukan hubungan antara faktor ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan. Model terbaik yang terpilih berdasarkan hasil uji Hausman digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan empiris dan rekomendasi kebijakan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Terdapat tiga model yang bisa digunakan untuk menganalisis pada metode regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Sitorus & Yuliana, 2018). Melakukan uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model paling baik. Hasil regresi model data panel ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	50.5934	61.6917	33.3974
GROWTH	-0.1293	-0.0170	-0.0243
LogPDRB	0.0371	-2.5720	-0.4937
LogUMK	0.3556	0.7575	0.8690
TPAK	0.0485	-0.0030	0.0111
IPM	-0.6727	-0.2480	-0.3828
R ²	0.6526	0.9896	0.5211
Adjusted. R ²	0.6467	0.9880	0.5130
Statistik F	111.9727	596.8461	64.8543
Prob. F-Stat.	0,0000	0,0000	0,0000
Uji Pemilihan Model			
Uji Chow			
Cross-section F (37,261) = 230.7429; Prob. F = 0,0000			
Uji Hausman			
Cross-section random $\chi^2(5) = 35,1703$; Prob. $\chi^2(5) = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah

Pemilihan Model Estimasi Terbaik

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik diantara *Common* dan *Fixed Effects* yang digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini dilakukan berdasarkan Hipotesis dari uji Chow sebagai berikut:

H_0 : Model mengikuti *Common Effects*

H_A : Model mengikuti *Fixed Effects*

Penentuan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow dengan memperhatikan nilai probabilitas Cross-Section F lebih atau kurang dari α . Jika probabilitasnya kurang dari α maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model *Fixed Effects* lebih tepat diterapkan dari pada *Common Effects*. Berdasarkan Tabel 1, hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Crosssection F* (0,0000) kurang dari α (0,01), yang berarti H_0 ditolak dan model mengikuti *Fixed Effects Model* (FEM).

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling baik diantara *Fixed Effects* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan berdasarkan Hipotesis dari uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : Model mengikuti *Random Effect Model*

H_A : Model mengikuti *Fixed Effects*

Penentuan model terbaik dilakukan melalui Uji Hausman dengan memperhatikan nilai probabilitas *Chi-Square* lebih atau kurang dari α . Jika probabilitasnya kurang dari α maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model *Fixed*

Effects lebih tepat diterapkan dari pada *Random Effect Model*. Berdasarkan Tabel 1, hasil Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* (0,0000) kurang dari α (0,01), yang berarti H_0 ditolak dan model mengikuti *Fixed Effects Model* (FEM).

Pada pengujian yang telah dilakukan untuk memilih model terbaik yaitu uji Chow dan uji Hausman, dapat diambil Kesimpulan bahwa model yang paling baik untuk analisis regresi data panel adalah *Fixed Effects Model*.

Tabel 2. Model Estimasi FEM

$JPM_{it} = 61,6917 - 0,0170GROWTH_{it} - 2,5720logPDRB_{it} + 0,75758logUMK_{it}$				
$- 0,0030TPAK_{it} - 0,2480IPM_{it}$				
(0,2246)	(0,0147)**	(0,2441)	(0,8446)	(0,0000)*
$R^2 = 0,9896; DW = 1,6903 F = 596,8461; Prob. F = 0,0000$				

Keterangan: *Koefisien signifikan pada α 0,01; **Koefisien signifikan pada α 0,05; ***Koefisien signifikan pada α 0,10.

Uji F digunakan untuk menguji model eksis ketika setidaknya satu variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol). Terhadap lima variabel independent dalam model ekometrika, maka formulasi hipotesisnya adalah;

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, koefisien regresi secara simultan bernilai nol (model terestimasi tidak eksis); $H_A: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol (model terestimasi eksis). H_0 ditolak apabila nilai p value, probabilitas/F-statistik $< \alpha$ sedangkan H_0 tidak ditolak apabila nilai p value, probabilitas/F-statistik $> \alpha$.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa model terestimasi FEM eksis dengan probabilitas empirik statistik F bernilai 0,0000 lebih kecil dari α (0,01), yang berarti H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah model terestimasi eksis, dapat diartikan Pertumbuhan Ekonomi, Produk domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Koefisien Determinan (R^2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Berdasarkan table 2 dapat dilihat R^2 sebesar 0,9896, artinya 98,96% variasi variable Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Produk domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan sisanya 3,67% dijelaskan oleh variabel diluar model.

Uji t digunakan untuk menganalisis tingkat signifikan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis dari uji t sendiri sebagai berikut:

H_0 : variabel independent ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan

H_A : variabel independent ke-i memiliki pengaruh signifikan

H_0 akan ditolak jika nilai probabilitas statistik $t < \alpha$. Hasil uji t dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	Sig. t	Kriteria ($\alpha = 0,05$)	Kesimpulan
GROWTH	0,2246	$> 0,05$	Tidak Signifikan
LOG(PDRB)	0,0147	$< 0,05$	Signifikan
LOG(UMK)	0,2441	$> 0,05$	Tidak Signifikan
TPAK	0,8446	$> 0,05$	Tidak Signifikan
IPM	0,0000	$< 0,05$	Signifikan

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$).

Sementara itu, variabel Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai koefisien regresi LOG(PDRB) sebesar $-2,5720$ menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebesar 1 persen akan menurunkan Tingkat Kemiskinan (TM) sebesar 0,02572 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinannya.

Sementara itu, nilai koefisien regresi IPM sebesar $-0,2480$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen pada Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan Tingkat Kemiskinan (TM) sebesar 0,2480 persen. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat secara signifikan mampu menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Tabel.4 Efek dan konstanta wilayah

Wilayah	Efek	Konstanta
Kabupaten Pacitan	1.759896	63.451616
Kabupaten Ponorogo	-1.302884	60.388836
Kabupaten Trenggalek	-0.252100	61.439620
Kabupaten Tulungagung	-3.125591	58.566129
Kabupaten Blitar	-1.875440	59.816280
Kabupaten Kediri	0.637301	62.329021
Kabupaten Malang	-1.066278	60.625442
Kabupaten Lumajang	-3.238553	58.453167
Kabupaten Jember	-2.334295	59.357425
Kabupaten Banyuwangi	-2.982723	58.708997
Kabupaten Bondowoso	0.875622	62.567342
Kabupaten Situbondo	-0.548290	61.143430
Kabupaten Probolinggo	5.142320	66.834040
Kabupaten Pasuruan	-2.441394	59.250326
Kabupaten Sidoarjo	-1.688498	60.003222
Kabupaten Mojokerto	-0.046270	61.645450
Kabupaten Jombang	-0.869300	60.822420
Kabupaten Nganjuk	0.699673	62.391393
Kabupaten Madiun	0.337804	62.029524

Wilayah	Efek	Konstanta
Kabupaten Magetan	-0.104267	61.587453
Kabupaten Ngawi	3.361231	65.052951
Kabupaten Bojonegoro	1.493873	63.185593
Kabupaten Tuban	3.623305	65.315025
Kabupaten Lamongan	2.946219	64.637939
Kabupaten Gresik	2.789713	64.481433
Kabupaten Bangkalan	6.080134	67.771854
Kabupaten Sampang	7.488663	69.180383
Kabupaten Pamekasan	1.401516	63.093236
Kabupaten Sumenep	6.705016	68.396736
Kota Kediri	0.003042	61.694762
Kota Blitar	-1.297330	60.394390
Kota Malang	-2.445015	59.246705
Kota Probolinggo	-3.487788	58.203932
Kota Pasuruan	-3.393254	58.298466
Kota Mojokerto	-3.269767	58.421953
Kota Madiun	-2.658027	59.033693
Kota Surabaya	-1.079195	60.612525
Kota Batu	-5.839068	55.852652

Sumber: *Eviews 12.0, 2025*

Nilai konstanta masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4. Nilai konstanta tertinggi dimiliki Kabupaten Sampang, yaitu sebesar 69.180383. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia, maka Kabupaten Sampang cenderung memiliki Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Setelah Kabupaten Sampang, dua kabupaten/kota dengan konstanta tertinggi adalah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan

Jumlah penduduk miskin di tiga puluh delapan kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2017-2024 ternyata dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, variabel, pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2017-2024. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi belum mampu secara langsung menurunkan kemiskinan, karena manfaat pertumbuhan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan teori Sukirno (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh

ketimpangan distribusi pendapatan, konsentrasi pertumbuhan di sektor padat modal, serta rendahnya kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya ekonomi. Studi Kirana & Ayuningsasi (2022) dan Priseptian & Primandhana (2022) juga menemukan hasil serupa bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena hasil pembangunan belum tersebar secara merata dan belum diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, melainkan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan sektor non-produktif bagi kelompok berpendapatan rendah.

Temuan ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat inklusif dan tidak otomatis mengurangi kemiskinan tanpa didukung oleh kebijakan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis level kabupaten/kota di Jawa Timur dengan periode 2017–2024, yang menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan dan kemiskinan sangat bergantung pada struktur sektoral dan kapasitas daerah dalam menyerap tenaga kerja miskin. Secara konseptual, hasil ini menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak cukup mengandalkan percepatan pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu diimbangi dengan kebijakan pemerataan, peningkatan produktivitas sektor padat karya, serta perluasan akses pendidikan dan pelatihan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh kelompok masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. PDRB mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ketika produktivitas daerah meningkat, sektor-sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa turut berkembang, sehingga daya serap tenaga kerja juga bertambah dan pendapatan rumah tangga meningkat. Kondisi ini memperkuat pernyataan Todaro & Smith (2015) bahwa pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output regional merupakan faktor fundamental dalam mengurangi kemiskinan, terutama bila disertai pemerataan hasil pembangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Sari & Novianti (2024) yang menunjukkan bahwa kenaikan PDRB berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Purnamasari (2023) di Provinsi Jawa Barat, di mana peningkatan PDRB sektor industri berperan besar dalam menekan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan temuan Suharto (2022), yang menemukan bahwa efek PDRB terhadap kemiskinan dapat melemah ketika ketimpangan pendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat konsep bahwa PDRB merupakan instrumen penting dalam penurunan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemerataan distribusi hasil pembangunan dan keterlibatan masyarakat miskin dalam aktivitas ekonomi produktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis data panel 2017–2024 di tingkat kabupaten/kota Jawa Timur yang menegaskan pentingnya

pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan.

Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara peningkatan upah dan produktivitas tenaga kerja, serta belum meratanya distribusi kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Meutia Balqis et al. (2024) yang menemukan bahwa peningkatan upah minimum di Provinsi Aceh tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena dipengaruhi oleh variabel lain seperti kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Dengan kata lain, meskipun upah meningkat, manfaat ekonomi tidak langsung dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Faadihilah & Primadha (2023) yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat secara signifikan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Bekasi, terutama bila diiringi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian Ghinastri & Syafitri (2024) menyoroti efek ganda kebijakan upah minimum: mampu menekan kemiskinan namun juga dapat menimbulkan efek inflasi upah yang justru menekan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan upah minimum sangat bergantung pada konteks struktural ekonomi daerah dan kesiapan sumber daya manusianya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa upah minimum di Jawa Timur belum menjadi instrumen efektif dalam menekan kemiskinan tanpa dukungan kebijakan komplementer seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan sektor padat karya, dan pemerataan kesempatan kerja antarwilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil temuan, menunjukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2017-2024. Secara teoritis, peningkatan TPAK diharapkan dapat menurunkan kemiskinan karena bertambahnya penduduk usia produktif yang bekerja seharusnya meningkatkan pendapatan agregat masyarakat. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan, terutama karena sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dengan produktivitas rendah, yang mencerminkan fenomena *working poor*.

Hasil temuan ini sejalan dengan Geisya & Riko (2024), yang menunjukan bahwa tingginya TPAK tidak secara signifikan menurunkan kemiskinan karena sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dengan upah rendah. Hal serupa ditemukan oleh Rabbani & Hasmarini (2024), di mana TPAK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Rendahnya kualitas tenaga kerja, keterbatasan produktivitas, dan ketidaksesuaian antara

keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar mengakibatkan peningkatan partisipasi kerja belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, tingginya partisipasi angkatan kerja tidak menjamin penurunan kemiskinan apabila sebagian besar pekerjaan memiliki kualitas rendah, upah tidak layak, dan keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memperluas kesempatan kerja, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan sosial, dan mobilitas ekonomi yang lebih baik, sehingga partisipasi angkatan kerja dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam Upaya pengentasan kemiskinan. IPM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara simultan membentuk modal manusia yang produktif, adaptif, dan berdaya saing.

Pada dimensi pendidikan, peningkatan akses dan mutu pendidikan mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil yang responsif terhadap perubahan ekonomi. Pada dimensi kesehatan, masyarakat dengan kondisi kesehatan yang baik memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi serta menekan beban biaya kesehatan yang lebih rendah. Sementara itu, pada dimensi pendapatan, standar hidup yang layak memungkinkan Masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan generasi berikutnya.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Yamakasa (2025) yang menyatakan bahwa IPM memiliki koefisien negatif dan signifikan secara statistik, sehingga peningkatan IPM suatu daerah cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya IPM berdampak pada penurunan produktivitas penduduk, yang berimplikasi pada rendahnya pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan jumlah penduduk miskin (Goni et al., 2022).

Dengan demikian, strategis pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pendekatan multidimensi melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi merupakan langkah strategi dalam mewujudkan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan model estimasi terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Nilai koefisien regresi PDRB sebesar -2.5720 dan IPM sebesar -0.2480 mengindikasikan bahwa peningkatan kedua variabel tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berfokus pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pembangunan sektor produktif, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Di sisi lain, peningkatan IPM dapat dicapai

dengan memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan agar masyarakat menjadi lebih produktif dan berdaya saing. Upaya ini perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan strategi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dapat menurun secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5. Daftar Pustaka

- A'laa, R. D. and Sutikno, S. (2018). Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan. Pemodelan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Gini Rasio Pembangunan Di Jawa Timur Dengan Regresi Spasial, 7(2).
- Asmoro, F. A. F., Hasmarini, M. I., & Fakhruddin, H. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1788. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.3023>
- Azhari, I. M., & Retno Faridatussalam, S. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Tahun 2016-2021: Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 31–40. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.1886>
- Azizah, S. N., & Setyowati, E. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Upah Minimum Kabupaten Kota Terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2017-2021. *Procedia of Social and Humanities*, 0672(c), 80–87.
- Budi Rusdianto, Nuri Rahayu, Timoria Sitorus, Rusiadi, & Suhendi. (2024). Diagnosing Poverty Eradication Through Literacy: Analysis From National Socioeconomic Survey North Sumatera Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 1318–1328. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i4.277>
- Faadihilah, G. F., & Wiwin Priana Primadha. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1794–1801. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462>
- Fauzi, M. R. (2019). Ketimpangan, Pola Spasial, dan Kinerja Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan-JP2WD)*, 3(3), 157–171. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.157-171>
- Geisya, R., & Riko, W. (2024). Analisis pengaruh angka harapan hidup, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur. 7(6), 21–37.
- Goerres, A., & Vanhuysse, P. (2020). *Global Political Demography The Politics of Population Change* Edited by.
- Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42779/37706>

- Hermawan, W., Heriyaldi, H., & Tjahjawardita, A. (2024). The Influence of Financial Inclusion and Internet Access on the Income of Poor Households. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(1), 84–104. <https://doi.org/10.23917/jep.v25i1.23517>
- Hildegunda, W. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.19900.19.7.2018>
- Kirana, D. N., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). Pengaruh Remitansi, Foreign Direct Investment, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 35. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>
- Kusuma, N. R., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Maulana, F. A. (2024). Actualization of Indonesian Economic and Cultural Development Reviewed from Ibn Khaldun's Thoughts. *Mimbar Agama Budaya*, 41(1), 95–108. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v41i1.38872>
- Marini, T. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BERAU Tety. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(1), 108–137.
- Meutia Balqis, Nurlathifatul Qalbiyah Sinaga, Asnidar Asnidar, Nurlaila Hanum, Puti Andiny, & Safuridar Safuridar. (2024). Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 01–13. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1032>
- Nafisah, A. K., & Anas, M. (2022). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan terhadap Kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 45–54.
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- O'Donnell, O. (2024). Health and health system effects on poverty: A narrative review of global evidence. *Health Policy (Amsterdam, Netherlands)*, 142, 105018. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.105018>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Rabbani, A. S., & Hasmarini, M. I. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja , Indeks Pembangunan Manusia , Upah Minimum dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2017-2021. 7, 4537–4543.
- Rachmadani, A. A., Mulyaningsih, T., & Ertimi, B. (2023). The Role of Human Capital and Regional Effects on Earnings: Multilevel Mixed Effect Regression Approach.

- Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 24(2), 221–232. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i2.23123>
- Sari, E. P., & Novianti. (2024). Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022. *Ekodestinas*, 2(1), 36–56. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.409>
- Silvia Luthfiyah Ghinastri, & Wildan Syafitri. (2024). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.6>
- Sitorus, Y. M., & Yuliana, L. (2018). Penerapan Regresi Data Panel Pada Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktifitas Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Luar Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Media Statistika*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/medstat.11.1.1-15>
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi 3). PT Rajagrafindo Persada.
- Yamakasa, H. G. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Representasi Shuudan Shugi dalam Penyelenggaraan. 5(2).